

Volume 1 | No.1 | Edisi : Juli – Desember 2012 | ISSN : 2302-4585

JURNAL

Kompetitif



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Kompetitif

Vol. 1

No. 1

Hal : 1 - 113

Palembang, September 2012

ISSN: 2302 - 4585

KOMPETITIF

Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

Dewan Redaksi

- Pelindung : Prof. Dr. Ir. Edizal AE (Rektor)
- Pembina : Syaiful Sahri,SE.MSi (Dekan Fakultas Ekonomi)
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE.,M.M
- Pimpinan Umum : Hj.Nina Fitriana, SE.,M.Si
- Ketua Penyunting : Msy.Mikial,SE.,Ak.,M.Si
- Penyunting Ahli : Prof. Dr. H. Masngudi, APU (Universitas Borobudur)
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE.,M.M (UTP)
Prof. Dr. H.Taufiq Marwah, SE.,M.Si (Universitas Sriwijaya)
Dr. Kamaluddin,SE.,M.M (Universitas Bengkulu)
Dr. Helmi Yazid,SE.,M.Si (Univ. Sultan Ageng Tirtayasa)
- Penyunting Pelaksana : Sugiri Dinah, SE.,M.Si, Amrillah Azrin,SE.MM,
Lusia Nargis, SE.,M.Si, Rizal Effendi,SE.MSi
- Sekretariat : Muhammad Said, SE.MSi (Pembantu Umum)
: Ernawati.SE.Ak (Keuangan)
: Yun Suprani,SE.MSi (Administrasi)
- Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
- Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
Jl. Kapt. Marzuki No.2446 Kamboja Palembang 30129
Telp. 0711-354654 E-mail : redaksi.fe_utp@yahoo.co.id

Jurnal "**Kompetitif**" adalah jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang manajemen, akuntansi dan perbankan. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun (Januari, Juli) dan bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang manajemen, akuntansi dan perbankan kepada masyarakat ilmiah.

KOMPETITIF

Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang

DAFTAR ISI

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam
Kamsrin Sa'i 1 - 11

Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin
Msy. Mikial 12 – 20

Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Rizal Effendi 21 – 32

Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan
Amrillah Azrin 33 - 42

Analisa Hubungan Kekayaan Bersih Wajib Pajak Badan Dengan Beban Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Sonang PP 43 - 57

Persepsi Konsumen Terhadap Persaingan Antar Merek Melalui Iklan (Studi Kasus Persaingan Antar Produk Deterjen Rinso Dan So Klin)
Lusia Nargis 58 - 69

Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Tanggungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang
Meti Zuliyana 70 – 78

Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Prodexim Palembang
Kusminaini Armin 79 – 90

Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang
Nina Fitriana , Agustina M 91 – 100

Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Prinsip *Value For Money* Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Rosalina Pebrica Mayasari 101 – 113

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

*Rizal Effendi *)*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of local revenue (PAD) of the local government expenditures Musi Banyuasin, analyzing the effect of the balance of funds to local government expenditures Musi Banyuasin and determine the level of independence that had been reached by the district Musi Banyuasin. The results at the district Musi Banyuasin in the period 2007-2010 shows that the revenue (PAD), and Fund Balance has effectiveness against government expenditures Musi Banyuasin. But the effectiveness of Revenue does not have any significant influence on regional spending Musi Banyuasin, while the effectiveness of the Balanced Fund has a very significant effect on their spending. In addition, the increasing trend toward shopping areas PAD indicates the level of independence of the local government district Musi Banyuasin progress though the level is still quite low.

Keywords: Effectiveness, Revenue, Fund Balance.

A. PENDAHULUAN

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, Pendapatan Daerah ini dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah kabupaten Musi Banyuasin adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Kelompok Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Musi Banyuasin

dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari : (a) Hasil pajak daerah; (b) Hasil retribusi daerah; (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Struktur komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2007 – 2009 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Berikut ini adalah rincian komponen Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2007 – 2009 :

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :
Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan

*) Dosen Fakultas Ekonomi UTP

Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Struktur komponen Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan di kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2007 – 2009 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Adapun rincian dari dana perimbangan pada kabupaten Musi Banyuasin periode 2007 – 2009 yaitu Dana Perimbangan terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Provinsi.

Struktur komponen Belanja Daerah di kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2007 – 2009 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Adapun rincian dari belanja daerah pada kabupaten Musi Banyuasin periode 2007 – 2009 terbagi atas Belanja daerah terdiri dari empat komponen yaitu : Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Tersangka.

Struktur komponen Dana Perimbangan di kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2007

berdasarkan pada UU No. 17 Tahun 2003 dan Draft Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada struktur Dana Perimbangan terdapat perbedaan antara periode 2007 – 2009 dan 2010. Pada periode 2007 – 2009, struktur komponen APBD yang merupakan bantuan dari pemerintah dicantumkan sebagai Dana Perimbangan yang akan dibagi lagi ke beberapa kategori, akan tetapi pada periode 2010, bantuan yang berasal dari pemerintah disebut sebagai Pendapatan Transfer.

Adanya peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan adanya indikasi bahwa peningkatan belanja yang tinggi tersebut dikarenakan belanja pemerintah yang tidak efisien. Kecenderungan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dalam jangka panjang ketergantungan ini seharusnya dikurangi, karena akan berdampak negatif pada kemandirian daerah.

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pada saat ini di Indonesia otonomi daerah sudah berjalan, tapi kenyataannya setiap daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat

dalam mengatur rumah tangganya masing-masing. Secara langsung penerapan otonomi daerah berdampak pada kebutuhan dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi (Nordawan, 2007:181).

2. Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Termasuk Dalam PAD adalah sebagai berikut :

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

dan pembangunan daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009)

Pajak kabupaten terdiri atas Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C dan Pajak parkir.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 18 antara lain ditetapkan tiga golongan retribusi yaitu : Retribusi jalan umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perijinan tertentu.

b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Berdasarkan Undang_undang Nomor 5 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. Atas penyertaanya tersebut maka pemerintah daerah akan

mendapatkan keuntungan berupa bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersangkutan

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Jenis penerimaan ini antara lain hasil penjualan aset tetap daerah yang tidak di pisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

3. Dana Perimbangan

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem

transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Struktur komponen Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan di kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2007 – 2009 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Adapun rincian dari dana perimbangan pada kabupaten Musi Banyuasin periode 2007 – 2009 yaitu sebagai berikut :

Dana Perimbangan terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

1. Dana bagi hasil pajak ini terbagi atas : Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTP (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan), dan Pajak Penghasilan.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) terdiri atas : Bagi Hasil PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), Bagi Hasil Iuran Tetap / Landrent, Royalty, Pungutan Hasil Perikanan, Sektor Pertambangan Minyak

Bumi, Sektor
Pertambangan Gas Alam

b. Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

d. Dana Perimbangan dari Provinsi

Struktur komponen Dana Perimbangan di kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2007 berdasarkan pada UU No. 17 Tahun 2003 dan Draft Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada struktur Dana Perimbangan terdapat perbedaan antara periode 2007 – 2009 dan 2010.

Pada periode 2007 – 2009, struktur komponen APBD yang merupakan bantuan dari pemerintah dicantumkan sebagai Dana Perimbangan yang akan dibagi lagi ke beberapa kategori. Akan tetapi pada periode 2010, bantuan yang berasal dari pemerintah disebut sebagai Pendapatan Transfer.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN”**.

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah Musi Banyuasin ?
2. Bagaimanakah efektivitas dana perimbangan terhadap belanja pemerintah daerah Musi Banyuasin ?
3. Bagaimanakah tingkat perkembangan kemandirian pemerintah daerah Musi Banyuasin ?

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Rancangan Penelitian adalah rekayasa operasional bagaimana sebuah penelitian akan dilaksanakan dalam rangka meminimalkan unsur kekeliruan (error). Pendekatan ilmu dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu Akuntansi Sektor

Publik dan secara lebih khusus pada aspek Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam efektivitas belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara Teknik Analisis yaitu Analisis Kuantitatif, menganalisa dan menilai semua data finansial berupa ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Analisis Kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh

dari objek penelitian serta membandingkannya dengan teori-teori dan ketentuan yang berlaku umum.

2. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel adalah sebuah atribut atau sifat dari objek yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini variabelnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.

Tabel 1
Variabel dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak daerah - Retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD dan investasi lainnya).
Dana Perimbangan	Merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN	<ul style="list-style-type: none"> - Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus
Belanja Daerah	Mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Aparatur Daerah - Belanja Pelayanan Publik - Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan - Belanja Tidak Tersangka

3. Prosedur Pengumpulan Data

- e. Wawancara, dengan mengadakan komunikasi langsung secara lisan dengan pihak yang diteliti.
- f. Observasi, melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data.
- g. Kuisisioner, dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang dianggap perlu.
- h. Dokumenter, dengan cara memperoleh data dengan jalan mengutip data atau catatan yang disediakan perusahaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Trend Dana Perimbangan dalam Belanja Daerah

Analisis ini menunjukkan tingkat kecenderungan arah perkembangan penggunaan dana perimbangan dalam pengalokasian belanja daerah secara total dari tahun ke tahun berdasarkan tahun dasar. Analisis ini menggambarkan arah tingkat ketergantungan suatu pemerintah daerah tersebut dalam membiayai belanja

daerahnya baik itu belanja rutin maupun yang bersifat pembangunan. Analisis ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan :

Y' = Perkembangan tingkat rasio dana perimbangan dalam belanja daerah

Y = Variabel rasio dana perimbangan dalam belanja daerah

a = konstanta (nilai Y pada saat X=0)

b = kemiringan / trend (koefisien perubahan nilai Y karena perubahan nilai X)

X = Waktu

Berdasarkan rumus di atas maka perhitungan trend dana perimbangan dalam belanja daerah Pemkab Musi Banyuasin dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 2
Perhitungan Rumus Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2007 – 2010

Tahun Anggaran	Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah (Y)	Tahun (X)	XY	X ²
2007	95,77	-3	-287,31	9
2008	96,58	-1	-96,58	1
2009	96,31	1	96,31	1
2010	85,30	3	255,90	9
Total	373,96	0	-31,68	20

Sumber Data : Diolah dari tabel 4.3 rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah

Nilai a dan b dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{373,96}{4} = 93,49$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-31,68}{20} = -1,58$$

Diketahui bahwa : $Y' = 93,49 - 1,58X$

Dengan demikian dapat dicari nilai trendnya sebagai berikut :

Tabel 3
Perhitungan Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2007 – 2010

Tahun Anggaran	A	B	X	bX	Trend Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (Y = a - bX)
2007	93,49	1,58	-3	-4,74	98,23
2008	93,49	1,58	-1	-1,58	95,07
2009	93,49	1,58	1	1,58	91,91
2010	93,49	1,58	3	4,74	88,75

Sumber Data : Diolah dari tabel 4.7 rumus Trend Dana Perimbangan terhadap belanja daerah Pemda Musi Banyuasin

Persamaan trend di atas yaitu $Y' = 93,49 - 1,58X$ menunjukkan bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah cukup besar yaitu rata-rata 93,49% dengan mengalami penurunan sebesar 1,58% tiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar belanja daerah Pemkab Musi Banyuasin, sebesar 93,49% dananya berasal dari dana perimbangan.

Dari perhitungan dalam tabel 3 di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu empat tahun (2007-2010), trend dana perimbangan terhadap belanja daerah semakin menurun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya trend yang mengarah ke kanan bawah dari tahun ke tahun. Walaupun penurunan ini masih dalam angka yang cukup rendah, akan tetapi hal ini sangat signifikan dalam menunjukkan adanya upaya dari Pemkab Musi Banyuasin untuk mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat ataupun Provinsi. Trend yang semakin menurun ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, Pemkab Musi Banyuasin semakin menurangi sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah masih sangat rendah yaitu rata-rata 2,34% dengan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,11% tiap tahunnya. Sedangkan sebagian besar belanja daerah Pemkab Musi Banyuasin, sebesar 93,49% dananya berasal dari dana perimbangan. Sedangkan efektivitas dana perimbangan terhadap belanja daerah cukup besar yaitu rata-rata 93,49% dengan mengalami penurunan sebesar 1,58% tiap tahunnya.
2. Trend PAD yang semakin meningkat dan dana perimbangan yang semakin menurun menunjukkan bahwa perkembangan kemandirian Kabupaten Musi Banyuasin untuk setiap tahun anggarannya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Musi Banyuasin telah berusaha mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dan berusaha untuk dapat berotonomi sesuai dengan sasaran yang hendak dituju dalam otonomi daerah yaitu tercapainya kemandirian fiskal suatu

daerah. Selain itu Pemkab Musi Banyuasin telah berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap transfer dari pusat / provinsi dalam mengelola keuangan daerahnya dan berusaha untuk dapat menciptakan dan menggali lebih banyak potensi yang berasal dari daerahnya sendiri.

3. Rasio PAD terhadap belanja daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan asli daerahnya secara total. Selama kurun waktu empat tahun (2007-2010) peningkatan / penurunan jumlah pendapatan asli daerah akan diiringi dengan peningkatan / penurunan rasio PAD terhadap belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Rata - rata rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih di bawah 25% yaitu hanya sebesar 2,36% per tahun sehingga pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah bersifat instruktif yang berarti tingkat kemandirian kabupaten Musi Banyuasin masih sangat rendah dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi keuangan daerah
4. Rasio dana perimbangan terhadap belanja daerahnya sangat dipengaruhi oleh besarnya komponen - komponen

dana perimbangan itu sendiri dan juga besarnya pengalokasian untuk jumlah belanja daerah secara total. Hal ini dikarenakan peningkatan / penurunan dari jumlah dana perimbangan secara total tidak diiringi dengan peningkatan / penurunan rasio dana perimbangan, tetapi sebaliknya selama kurun waktu empat tahun, jumlah dana perimbangan selalu mengalami peningkatan.

Saran

1. Untuk meningkatkan tingkat kemandirian, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak dan retribusi daerah yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah misalnya dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta lebih meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari bagian laba badan usaha daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus lebih mengoptimalkan lagi upayanya dalam mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pusat berupa dana perimbangan dan bantuan dari

provinsi sehingga trend dari ketergantungan Pemkab Musi Banyuasin dalam jangka panjang akan menunjukkan penurunan yang lebih tajam lagi dan pada akhirnya akan mendorong pada terwujudnya tujuan otonomi daerah berupa kemandirian fiskal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, 2000, *Perpajakan*, Penerbit UPPAMPYKPN: Yogyakarta.
- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat: Jakarta.
- Abdul Halim, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat: Jakarta.
- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, PT Grafindo Persada: Jakarta.
- Deddy Nordiawan, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Dinas Pendapatan Daerah, Laporan Realisasi Penerimaan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin 2004 s/d 2007.
- Emzul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Difa Publisher: Jakarta.
- Husein Umar, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Aksar Pratama: Yogyakarta.
- Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto, 2003, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo, 2005, *Perpajakan*, Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah.
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta: Bandung.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.